

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI**

PERUBAHAN RENJA 2025



diskopukmperin.dumaikota.go.id

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2025. Penentuan target dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Periode 2021 - 2026. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Kami menyadari dokumen ini masih belum sempurna maka masukan dan koreksi sangat diharapkan guna perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Perubahan RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dumai, Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan
Perindustriaian Kota Dumai,

SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Pelaporan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	19
BAB IV PENUTUP.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan renja perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Renja perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian meliputi perubahan/penambahan anggaran program dan kegiatan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan kegiatan dan perubahan target kinerja yang akan dicapai.

Renja perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Renja Perubahan ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025, adalah:

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
7. Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang OSS
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 Tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi.
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang kebijakan industri nasional 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/kota;

21. Peraturan Menteri koperasi Nomor 18 tahun 2015 tentang pedoman, pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi pengusaha kecil menengah;
22. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 09/M.KUKM/10 Tentang pengawasan koperasi tahun 2020;
23. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kemenkopukm;
24. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam penyelenggaraan TKBM;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
30. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
31. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
32. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan industry provinsi Riau Tahun 2018-2038;

36. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
38. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.
39. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).
40. Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 202

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja perubahan adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja perubahan adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2025 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Perubahan 2025, disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Pentingnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ini dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari tabel dibawah dapatkan jabarkan bahwa di triwulan I realisasi anggaran sebesar Rp. 7.707.172.778,45 dan untuk triwulan II sebesar Rp. 3.041.626.814. Sampai dengan triwulan II, ada beberapa kegiatan yang telah mencapai target kinerja dan ada pula yang belum mencapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

TABEL TC-19
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA DUMAI

No	Sasaran RKPD		KODE REKENING	Utusan/Bidang Utusan Pemeliharaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/kendala	Tindak Lanjut			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		S=I+II+III+IV	10=9Bx100%				11 = 7 + 9	12=11/6 x100%	
												8	9	10	11												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																											
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Duma	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Anggota Koperasi dan UKM					43.869.787.494	17.188.828.116	6.068.465.305,20	1.129.288.475	1.435.979.269					2.565.267.744	42,27%	19.754.096.960	45,03%								
			2.17.2.17.3.301.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			186.528.900	48.247.200	7.721.893,05	-	4.218.000					4.218.000	54,62%	52.465.200	28,13%								
			2.17.2.17.3.301.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,00	22.301.300	3,00	7.036.400	1	1.044.108.15					-	0,00%	0,00%	3,00	7.036.400	60,00%	31,56%	Tidak Ada	Dijadwalkan triwulan III			
			2.17.2.17.3.301.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,00	22.446.400	3,00	7.154.550	1	1.208.625,00					-	0,00%	0,00%	3,00	7.154.550	60,00%	31,87%	Tidak Ada	Dijadwalkan triwulan III			
			2.17.2.17.3.301.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5,00	22.213.250	3,00	6.921.700	1	1.226.225,00	1,00	1.218.750			1	1.218.750	100,00%	99,39%	4,00	8.140.450	80,00%	36,65%	Tidak Ada	Telah selesai		
			2.17.2.17.3.301.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinas Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5,00	22.074.950	3,00	6.701.350	1	1.233.172,50					-	0,00%	0,00%	3,00	6.701.350	60,00%	30,36%	Tidak Ada	Dijadwalkan triwulan IV			
			2.17.2.17.3.301.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	14,00	97.493.000	7,00	20.433.200	3	3.009.762,40	3,00	2.999.250			3	2.999.250	100,00%	99,65%	10,00	23.432.450	71,43%	24,04%	Tidak Ada	Telah selesai		
			2.17.2.17.3.301.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.297.071.172	12.496.260.090	4.622.251.039,15	894.564.248	938.508.038					1.833.072.286	39,66%	14.329.332.376	52,49%								
			2.17.2.17.3.301.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138,00	26.973.770.772	76,00	12.364.139.090	31	4.591.311.680,00	7,75	894.564.248	5,17	910.268.288		13	1.804.832.536	41,67%	39,31%	88,92	14.168.971.626	64,43%	52,53%	Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	6,00	72.018.600	2,00	7.820.600	1	5.089.023,15	0,75	3.689.750			1	3.689.750	75,00%	72,50%	2,75	11.510.350	45,83%	15,98%	Tidak Ada	Dijadwalkan Triwulan IV		
			2.17.2.17.3.301.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	11,00	251.281.800	3,00	124.300.400	1	25.850.336,00	0,90	24.550.000			1	24.550.000	90,00%	94,97%	3,90	148.850.400	35,45%	59,24%	Tidak Ada	Sedang Proses		
			2.17.2.17.3.301.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			230.126.575	76.857.400	11.887.412,00	-	10.125.000					10.125.000	85,17%	86.982.400	37,80%								
			2.17.3.301.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,00	230.126.575	3,00	76.857.400	1	11.887.412,00	0,90	10.125.000			1	10.125.000	90,00%	85,17%	3,90	86.982.400	65,00%	37,80%	Tidak Ada	Sedang Proses		
			2.17.2.17.3.301.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.470.238.109	1.199.642.946	252.592.811,00	-	160.189.310					160.189.310	63,42%	1.359.832.256	21,02%								
			2.17.2.17.3.301.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	14,00	158.150.020	6,00	27.080.100	4	4.746.910,00	2,00	1.606.250			2	1.606.250	50,00%	33,84%	8,00	28.686.350	57,14%	18,14%	Tidak Ada	Sedang Proses		
			2.17.2.17.3.301.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	14,00	816.724.100	6,00	197.562.931	4	26.065.305,00	2,00	12.949.750			2	12.949.750	50,00%	49,68%	8,00	210.512.681	57,14%	25,78%	Tidak Ada	Sedang Proses		
			2.17.2.17.3.301.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	37,00	202.819.000	13,00	37.651.550	12	13.995.250,00	6,00	5.934.250			6	5.934.250	50,00%	42,40%	19,00	43.585.800	51,35%	21,40%	Tidak Ada	Sedang Proses		

No	Sasaran RKP		KODE REKENING	Usan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (ototome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan											Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP s/d tahun 2025 (%)	Peringkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/kendala	Tidak Lanjut			
							7		8		I		II		III		IV													
	1	2	3	4	5	6		7		8		I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9/8x100%		11 = 7 + 9		12=11/6 x100%		13	14	15
	Sasaran Kota	Sasaran PD			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			2.17.2.17.3.301.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik kantor yang disediakan	37,00	118.796.400	14,00	45.942.000	11	15.635.186,00		6,00	8.854.400					6	8.854.400	54,55%	56,63%	20,00	54.796.400	54,05%	46,13%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	25,00	1.630.299.200	17,00	55.824.000	4	8.539.000,00		1,00	1.663.500					1	1.663.500	25,00%	19,48%	18,00	57.487.500	72,00%	3,53%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5,00	68.906.000	3,00	21.272.000	1	5.770.000,00		0,60	3.540.000					1	3.540.000	60,00%	61,35%	3,60	24.812.000	72,00%	36,01%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2,00	33.100.000	1,00	3.555.000	1	3.375.000,00		1,00	3.375.000					1	3.375.000	100,00%	100,00%	2,00	6.930.000	100,00%	20,94%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5,00	3.441.441.389	3,00	810.755.365	1	174.466.160,00		0,70	122.266.160					1	122.266.160	70,00%	70,08%	3,70	933.021.525	74,00%	27,11%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.07	Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			1.638.450.000		91.450.000												0,00%			91.450.000		5,58%				
			2.17.2.17.3.301.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	44,00	331.000.000	7,00	30.750.000													0,00%	0,00%	7,00	30.750.000	15,91%	9,29%		Tidak Ada	
			2.17.2.17.3.301.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	60,00	1.307.450.000	6,00	60.700.000													0,00%	0,00%	6,00	60.700.000	10,00%	4,64%		Tidak Ada	
			2.17.2.17.3.301.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.265.803.273		2.706.223.873		1.656.276.150,00		234.724.227		245.373.161						480.097.388	45,45%		3.186.321.261		60,51%				
			2.17.2.17.3.301.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	5,00	22.270.000	3,00	6.870.000	1	1.000.000,00		0,50	500.000					1	500.000	50,00%	50,00%	3,50	7.370.000	70,00%	33,09%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	5,00	1.128.513.153	3,00	442.809.073	1	200.721.510,00	0,17	26.324.227	0,08	35.249.841				0	61.574.068	25,00%	30,88%	3,25	504.383.141	65,00%	44,69%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5,00	4.115.020.120	3,00	2.256.544.800	1	854.554.640,00	0,31	208.400.000	0,15	209.623.320				0	418.023.320	46,15%	48,92%	3,46	2.674.568.120	69,23%	65,00%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.781.568.465		570.147.607		117.736.000,00			77.565.760							77.565.760	65,88%		647.713.367		23,29%				
			2.17.2.17.3.301.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6,00	209.296.000	3,00	83.148.000	2	20.800.000,00		0,50	8.250.000					1	8.250.000	25,00%	39,66%	3,50	91.396.000	58,33%	43,67%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	50,00	1.271.183.500	28,00	277.115.407	14	88.560.000,00		10,00	62.145.760					10	62.145.760	71,43%	70,17%	38,00	339.261.167	76,00%	26,69%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	140,00	512.290.000	36,00	70.890.000	28	6.336.000,00		23,00	5.130.000					23	5.130.000	82,14%	80,97%	59,00	76.020.000	42,14%	14,84%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.301.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4,00	788.799.965	3,00	138.996.200	1	2.040.000,00		1,00	2.040.000					1	2.040.000	100,00%	100,00%	4,00	141.036.200	100,00%	17,88%		Tidak Ada	Sedang Proses	
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			2.664.000.000				267.508.217,75										0,00%					0,00%				
			2.17.2.17.3.304.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota			2.664.000.000				267.508.217,75										0,00%					0,00%				
			2.17.2.17.3.304.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	45,00	1.332.000.000	0,00		45	243.808.217,75											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	Menunggu RKP/ Perubahan
			2.17.2.17.3.304.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kab/kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	65,00	1.332.000.000	0,00		65	23.700.000,00											0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	Dijadwalkan Triwulan III
				PROGRAM PENALAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			2.138.200.000		114.836.600		101.217.835,50		26.091.000								26.091.000	25,78%		140.927.600		6,59%				
			2.17.2.17.3.304.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/USP Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam 1 daerah			2.138.200.000		114.836.600		101.217.835,50		26.091.000								26.091.000	25,78%		140.927.600		6,59%				
			2.17.2.17.3.304.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian kesehatan	78,00	1.504.020.000	21,00	45.949.000	26	57.280.185,50	6,50	21.901.000						7	21.901.000	25,00%	38,23%	27,50	67.850.000	35,26%	4,51%		Tidak Ada	Sedang Proses	

No	Sasaran RKP		KODE REKENING	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKP (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/kendala	Tindak Lanjut		
						6		7		8		I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9Bx100%		11 = 7 + 9					12=11/6 x100%	
	1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13	14	15		
	Sasaran Kota	Sasaran PD																												
			2.17.2.17.3.304.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Jala Kelola, Profil Risiko, Kinerja, Keuangan dan Pemodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan	81,00	634.180.000	21,00	68.887.600	27	43.937.650,00	0,00	4.190.000							4.190.000	0,00%	9,54%	21,00	73.077.600	25,93%	11,52%		Tidak Ada	Sedang Proses	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN			1.742.400.000	222.216.800	148.202.450,00	40.235.000	39.491.400								79.726.400	53,80%		301.943.200	17,33%							
			2.17.2.17.3.305.2.01	Pendidikan dan Lathan Perkerjasama bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota		1.742.400.000	222.216.800	148.202.450,00	40.235.000	39.491.400									79.726.400	53,80%		301.943.200	17,33%							
			2.17.2.17.3.305.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkerjasama serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkerjasama	205,00	1.742.400.000	60,00	222.216.800	70	148.202.450,00	21,54	40.235.000	21,54	39.491.400				43	79.726.400	61,54%	53,80%	103,08	301.943.200	50,28%	17,33%		Tidak Ada	Sedang Proses	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		464.100.000	187.166.810	96.318.087,00	1.410.000											1.410.000	1,46%		188.576.810	40,63%						
			2.17.2.17.3.306.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota		464.100.000	187.166.810	96.318.087,00	1.410.000											1.410.000	1,46%		188.576.810	40,63%						
			2.17.2.17.3.306.2.01.0002	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkerjasama dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkerjasama dan pengembangan ekonomi lainnya	400,00	464.100.000	200,00	187.166.810	100	96.318.087,00		1.410.000							1.410.000	0,00%	1,46%	200,00	188.576.810	50,00%	40,63%		Tidak Ada	Sedang Proses	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENGAJ, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		8.192.000.000	521.499.513	487.175.098,00	137.199.800	104.780.660										241.980.460	49,67%		763.479.973	9,32%						
			2.17.2.17.3.307.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemiraaan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan		8.192.000.000	521.499.513	487.175.098,00	137.199.800	104.780.660										241.980.460	49,67%		763.479.973	9,32%						
			2.17.2.17.3.307.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemiraaan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah melaksanakan Kemiraaan Usaha Mikro	193,00	165.500.000	60,00	2.985.000	63	71.151.600,00		42,00	47.011.600						42	47.011.600	66,67%	66,07%	102,00	49.996.600	52,85%	30,21%		Tidak Ada	Sedang Proses
			2.17.2.17.3.307.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	760,00	3.770.310.000	210,00	88.927.000	250	33.728.437,00	20,83	3.000.000						21	3.000.000	8,33%	8,89%	230,83	91.927.000	30,37%	2,44%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.3.307.2.01.0011	Facilitasi Sertifikasi dan standarsasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	105,00	1.217.845.000	30,00	71.800.000	35	38.914.000,00	2,92	1.000.000						3	1.000.000	8,33%	2,57%	32,92	72.800.000	31,35%	5,98%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.307.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	75,00	993.000.000	10,00	163.740.353	25	118.631.255,00	18,00	64.099.800						18	64.099.800	72,00%	70,89%	28,00	247.840.153	37,33%	24,96%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.307.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro terdita	3780,00	993.000.000	840,00	194.047.160	1260	207.230.660,00	387,69	53.100.000	420,00	53.769.060				808	106.869.060	64,10%	51,57%	1647,69	300.916.220	43,59%	30,30%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			2.17.2.17.3.307.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	55,00	1.052.345.000	0,00		55	17.519.136,00										0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%		Tidak Ada	Dijadwalkan Triwulan III	

No	Sasaran RKP		KODE REKENING	Usan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2025 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2025/Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Peringkat Daerah Penanggungjawab	Hambatan/kendala	Tidak Lanjut			
						6		7		8		I		II		III		IV		9=I+II+III+IV		10=9/8x100%		11 = 7 + 9					12=11/6 x100%		
	1	2		3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13	14	15		
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.982.000.000		122.172.300		130.552.610,00		22.800.000		50.094.210		-		-		72.894.210		55,84%		195.066.510		6,54%				
			2.17.2.17.3.308.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usahakecil		2.982.000.000		122.172.300		130.552.610,00		22.800.000		50.094.210		-		-		-		72.894.210		55,84%		195.066.510		6,54%			
			2.17.2.17.3.308.2.01.0005	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.	565,00	2.982.000.000	200,00	122.172.300	200	130.552.610,00	33,33	22.800.000	83,33	50.094.210					117	72.894.210	58,33%	55,84%	316,67	195.066.510	56,05%	6,54%		Tidak Ada	Sedang Proses	
	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri sebagai sektor Unggulan dalam mendukung Perekonomian Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																											
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			6.413.200.000		131.100.355		313.801.175,00		10.800.000		22.405.000		-		-		33.205.000		10,58%		164.305.355		2,56%				
			3.31.2.17.3.302.2.01	penyusunan dan Evaluasi rencana Pembangunan Industri kab/Kota		6.413.200.000		131.100.355		313.801.175,00		10.800.000		22.405.000		-		-		-	33.205.000		10,58%		164.305.355		2,56%				
			3.31.2.17.3.302.2.010001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	1,00	1.210.000.000			1	223.194.725,00		0,03	5.720.000						0	5.720.000	3,00%	2,56%	0,00	5.720.000	3,00%	0,47%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			3.31.2.17.3.302.2.010002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyiapan dan penyalahhan industri	Jumlah dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan penyalahhan industri	5,00	739.200.000			1	22.631.237,50									-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	Dijadwalkan Triwulan III	
			3.31.2.17.3.302.2.010003	Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1,00	844.000.000	1,00	61.930.455	1	32.817.965,50		0,50	16.685.000						1	16.685.000	50,00%	50,84%	1,50	78.615.455	150,00%	9,31%		Tidak Ada	Sedang Proses	
			3.31.2.17.3.302.2.010005	Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1,00	3.620.000.000	2,00	69.169.900	1	35.157.247,00	0,25	10.800.000							0	10.800.000	25,00%	30,72%	2,25	79.969.900	225,00%	2,21%		Tidak Ada	Sedang Proses	
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			844.200.000		-		22.200.000,00		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%				
			3.31.2.17.3.302.2.01	Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin Perluasan Usaha industri (IPU), Izin Usaha kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (PKI) kewenangan kabikota			844.200.000		-		22.200.000,00		-		-		-		-		-		0,00%		-		0,00%				
			3.31.2.17.3.302.2.010004	Facilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN) yang terintegrasi dg Sistem Inline Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui sinas yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	27,00	844.200.000			5	22.200.000,00									-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	Dijadwalkan Triwulan III	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Renstra 2016 – 2025 Setelah Perubahan

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Renstra Sebelum Perubahan	Target Renstra OPD sebelum Perubahan		Realisasi Capaian	
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Koperasi aktif	65,16%	71%	92,32%	95,38%
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	22,13%	55%	49,17%	45,45%
3.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	61,25%	65,9%	95,85%	92,41%
4.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	4,33%	14%	33,08%	77,03%

2.2 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dapat dirumuskan isi-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian Renstra (OPD).

Sebagaimana kita ketahui bahwa orientasi pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta Perindustrian di Kota Dumai, diperlukan adanya dukungan kekuatan internal dan eksternal. Kekuatan internal yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai

belum optimal, baik dalam memberi layanan publik maupun dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat umumnya

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam upaya mendukung program dan kegiatan pemberdayaan di bidang ekonomi daerah, masih dijumpai adanya berbagai Permasalahan internal dan eksternal yaitu :

A. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAAN KOPERASI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaa Koperasi dan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan kunjungan kelapangan untuk pemeriksaan dan pengawasan dokumen kelembagaan koperasi

2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan merupakan kegiatan penilaian kesehatan koperasi, kegiatan HUT Koperasi bagi koperasi yang berprestasi

3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pelaksanaan dengan sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi merupakan kegiatan pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi

4. PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya merupakan kegiatan pelatihan untuk Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan :
- ❖ Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pelaku UMKM. Karena kebanyakan pelaku UMKM sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan kewirausahaan yang memadai sebagai modal dasar dalam menekuni dunia bisnis. Hal ini dikarenakan kebanyakan

usaha yang dibangun dan dikelola oleh para UMKM kita pada umumnya diawali oleh seorang yang memiliki ketrampilan teknis membuat produk tertentu, bukan karena keterampilan dalam pemasaran dan manajerial. Karena itu sedikit sekali diantara UMKM itu memiliki kemampuan kewirausahaan (entrepreneur) sedangkan pengusaha yang sukses umumnya memulai usaha dari kemampuan pemasaran dan manajerial, kemudian baru diikuti dengan mendirikan usaha untuk memenuhi pangsa pasar yang potensial. Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan, ketrampilan dan motivasi bagi pelaku UMKM Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri dan siap bersaing di era pasar global

- ❖ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro
- ❖ Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro merupakan kegiatan sosialisasi sertifikasi halal
- ❖ Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik merupakan kegiatan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi
- ❖ Penyusunan Basis Data Usaha Mikro merupakan kegiatan pendataan usaha mikro yang ada di Kota Dumai
- ❖ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha

6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi merupakan kegiatan memfasilitasi UMKM melalui aplikasi Digiloka

B. Urusan Perindustrian

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku

2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Merupakan Program yang berisikan kegiatan :

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri dengan sub kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi merupakan kegiatan Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan

Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Dumai RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan akhir RKPD 2025 dengan hasil analisa kebutuhan pada RKPD 2025, adapun review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table dibawah ini.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Pada tahun 2025 di anggaran induk, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian melaksanakan 10 (Sepuluh) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan pagu Rp. 7.488.335.223. Untuk anggaran perubahan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengusulkan pagu setelah reconfusing sebesar Rp. 7.792.172.778,45 yaitu untuk pelaksanaan 10 (Sepuluh) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan.

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN											
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025											
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		
				SEBELUM	SESUDAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN					13.506.347.005,00	7.488.335.223,00	8.001.566.538	7.792.172.778,45	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.071.497.005,00	6.938.335.223,00	7.642.370.363	7.384.439.603,45		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.071.497.005,00	6.938.335.223,00	7.642.370.363	7.384.439.603,45		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	100 %	100 %	6.684.297.005,00	5.743.972.623,00	6.810.479.435	6.068.465.305,20		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	7 Dokumen	34.456.193,00	17.473.193,00	7.721.893	7.721.893,05	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.558.185,00	2.558.185,00	1.044.108	1.044.108,15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.551.500,00	2.551.500,00	1.208.625	1.208.625,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.452.450,00	2.452.450,00	1.226.225	1.226.225,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.466.345,00	2.466.345,00	1.233.173	1.233.172,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan	3 Laporan	24.427.713,00	7.444.713,00	3.009.762	3.009.762,40	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	10 Dokumen	2 Dokumen	4.213.859.195,00	3.988.036.605,00	5.612.297.299	4.622.251.039,15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	31 Orang/bulan	54 Orang/bulan	4.154.796.800,00	3.954.341.310,00	5.596.367.690	4.591.311.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	3.695.295,00	3.695.295,00	1.399.273	5.089.023,15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	55.367.100,00	30.000.000,00	14.530.336	25.850.336,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	1 Dokumen	43.338.800,00	30.000.000,00	7.837.412	11.887.412,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	43.338.800,00	30.000.000,00	7.837.412	11.887.412,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	16 Orang	0 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	0	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00	0,00		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	2 Orang	0 Orang					
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00	0,00		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	2 Orang	0 Orang					
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00	20.000.000,00		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang	0 Orang					
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	577.732.852,00	338.781.300,00	162.932.001	252.592.811,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.781.300,00	6.781.300,00	4.746.910	4.746.910,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket					
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				98.149.838,00	60.000.000,00	26.065.305	26.065.305,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4 Paket					
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				21.250.074,00	20.000.000,00	10.000.000	13.995.250,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	12 Paket	12 Paket					
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				21.624.400,00	20.000.000,00	9.580.786	15.635.186,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	11 Paket	11 Paket					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.005.730,00	20.000.000,00	8.539.000	8.539.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	8.940.000,00	8.000.000,00	4.000.000	5.770.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	4.125.000,00	4.000.000,00	-	3.375.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	396.856.510,00	200.000.000,00	100.000.000	174.466.160,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55 Unit	0 Unit	415.499.405,00	100.000.000,00	0	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	90.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0 Unit	105.000.000,00	50.000.000,00	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	220.499.405,00	0,00	-	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.060.690.560,00	1.060.320.560,00	956.554.830	1.056.276.150,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.370.000,00	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	202.926.240,00	202.926.240,00	197.760.510	200.721.510,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				4	5	6	7	8	9	
1	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Laporan	1 Laporan	855.394.320,00	855.394.320,00	757.794.320	854.554.640,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>							
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 Unit	45 Unit	288.720.000,00	189.360.965,00	63.136.000	117.736.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2 Unit	2 Unit	38.000.000,00	38.000.000,00	19.000.000	20.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dihavarkan Pajaknya</i>							
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		14 Unit	14 Unit	137.380.000,00	104.000.000,00	37.800.000	88.560.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>							
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		28 Unit	28 Unit	15.840.000,00	15.840.000,00	6.336.000	6.336.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>							
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	97.500.000,00	31.520.965,00	-	2.040.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>							
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	EKSEKUTIF PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATENKOTA	40 %	40 %	947.000.000,00	100.000.000,00	47.508.218	47.508.217,75	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	110 Unit Usaha	48 Unit Usaha	947.000.000,00	100.000.000,00	47.508.218	47.508.217,75	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		45 Unit Usaha	15 Unit Usaha	473.500.000,00	50.000.000,00	23.808.218	23.808.217,75	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>							

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				5	6	7	8	9	10	
1	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	65 Unit Usaha	33 Unit Usaha	473.500.000,00	50.000.000,00	23.700.000	23.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,13 %	13,13 %	757.850.000,00	150.000.000,00	75.126.836	101.217.835,50	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	52 Unit Usaha	20 Unit Usaha	757.850.000,00	150.000.000,00	75.126.836	101.217.835,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	26 Unit Usaha	13 Unit Usaha	564.250.000,00	75.000.000,00	35.379.186	57.280.185,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan								
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	27 Unit Usaha	7 Unit Usaha	193.600.000,00	75.000.000,00	39.747.650	43.937.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	25,55 %	25,55 %	598.950.000,00	157.931.000,00	115.627.050	148.202.450,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	70 Orang	40 Orang	598.950.000,00	157.931.000,00	115.627.050	148.202.450,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi								
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70 Orang	40 Orang	598.950.000,00	157.931.000,00	115.627.050	148.202.450,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/	40 %	40 %	121.000.000,00	100.000.000,00	94.908.087	341.318.087,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</i>	22 Koperasi	86 Koperasi	121.000.000,00	100.000.000,00	94.908.087	341.318.087,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya								
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</i>	100 Keluarga	50 Keluarga	121.000.000,00	100.000.000,00	94.908.087	96.318.087,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya</i>	0	36 Unit Usaha	0	0	-	245.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG BERMITRA	25 %	25 %	2.438.900.000,00	536.431.600,00	394.372.338	547.175.098,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan.	<i>Jumlah Usaha mikro</i>	10080 UMKM	880 UMKM	2.438.900.000,00	536.431.600,00	394.372.338	547.175.098,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i>	63 Unit Usaha	10 Unit Usaha	55.000.000,00	50.000.000,00	24.140.000	71.151.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>	250 Unit Usaha	15 Unit Usaha	1.000.000.000,00	75.000.000,00	30.728.437	33.728.437,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro								
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>	35 Unit Usaha	5 Unit Usaha	389.450.000,00	75.000.000,00	37.914.000	38.914.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		25 Unit Usaha	5 Unit Usaha	330.000.000,00	75.000.000,00	118.631.265	178.631.265,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1260 Unit Usaha	840 Unit Usaha	330.000.000,00	221.431.600,00	165.439.500	207.230.660,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	55 Orang	5 Orang	334.450.000,00	40.000.000,00	17.519.136	17.519.136,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA	7 %	7 %	523.500.000,00	150.000.000,00	104.348.400	130.552.610,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang dibina Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Manajemen Usaha, Kemasan dan Merk bagi IKM/UMK, Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha baru	115 UMKM 455 UMKM	200 UMKM	523.500.000,00	150.000.000,00	104.348.400	130.552.610,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	523.500.000,00	150.000.000,00	104.348.400	130.552.610,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.434.850.000,00	550.000.000,00	359.196.175	407.733.175,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.434.850.000,00	550.000.000,00	359.196.175	407.733.175,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE TERSELESAIKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA	78 %	78 %	981.100.000,00	400.000.000,00	286.316.175	313.801.175,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	981.100.000,00	400.000.000,00	286.316.175	313.801.175,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	385.000.000,00	250.000.000,00	223.194.725	223.194.725,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	254.100.000,00	50.000.000,00	22.631.238	22.631.237,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	242.000.000,00	50.000.000,00	16.132.966	32.817.965,50	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	24.357.247	35.157.247,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU	30 %	30 %	254.100.000,00	50.000.000,00	22.200.000	22.200.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Industri yang diberikan fasilitas</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	254.100.000,00	50.000.000,00	22.200.000	22.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)								
			<i>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	254.100.000,00	50.000.000,00	22.200.000	22.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSRI DI KAB/KOTA YANG MASUK DALAM SII NAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN Jumlah Data Perusahaan	70 %	70 %	199.650.000,00	100.000.000,00	50.680.000	71.732.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri</i>	3 Dokumen	2 Dokumen	199.650.000,00	100.000.000,00	50.680.000	71.732.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Capaian Kinerja dan Kerangka		PAGU INDIKATIF (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025		RKPD 2025	APBD 2025	APBD Pergeseran (Efisiensi) 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	
				SEBELUM	SESUDAH					
1	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	25.240.000	46.292.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	99.650.000,00	50.000.000,00	25.440.000	25.440.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan ini sebagai acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2025

Dumai, Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan
Perindustrian
Kota Dumai,

SEPRANEF SYAMSIR, AP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740925 199502 1 001